

## UPAYA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI IMPLEMENTASI KEMITRAAN YANG BERORIENTASI KESEJAHTERAAN PETANI

**Ernawati HD**

Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

### ABSTRACT

The objective was to obtain a profile of palm oil plantations and analyze implementation carried out by the partnership for Oil Palm in Jambi Province . With descriptive qualitative analysis methods , the output is generated in this study are recommendations about the implementation of the oil palm plantations partnership to achieve an equal partnership between actors are partners in a holistic manner in order to be able to increase the added value of palm oil while enhancing competitiveness and well-being of farmers. Performance is implemented by the partnership for Oil Palm in Jambi province has basically succeeded in creating independent farmers who can channel the aspirations of farmers , but has not been run in accordance with the processes and stages of partnership management activities for Oil Palm applicable. Partnerships should be developed aimed at creating self-reliance of farmers , there is a sense of caring , a sense of togetherness , and sustainability partnership relations as a whole, not partial . Each of these actors should be able to optimize the performance of partners partnership , beginning with data collection every business activity as a whole and each provides information to all parties in partnership , namely the Company , Farmers / farmer groups / cooperatives , government , banking and other Intermediary Institutions.

**Keywords:** *Oil palm plantations, implementation partnership, farmers welfare*

### PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat (pendapatan petani kelapa sawit pada 2010 diproyeksikan sekitar USD 2.000-2.500/KK/tahun dari sekitar USD 1.246-1.650/KK/tahun di tahun 2005); produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan untuk ekspor sebagai penghasil devisa (produksi tahun 2000 sebesar 7 juta ton meningkat menjadi sekitar 12,45 juta ton pada tahun 2005); ekspor CPO yang menghasilkan devisa (volume ekspor tahun 2000 sebesar 4,11 juta ton senilai USD 1,09 juta meningkat menjadi 10,37 juta ton senilai USD 3,76 juta pada tahun 2005); di tahun 2005 telah menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari 2,8 juta tenaga kerja di berbagai sub sistem dan menjadi sekitar 4 juta tenaga kerja pada tahun 2010 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2007).

Dari sisi upaya pelestarian lingkungan hidup, tanaman kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan berbentuk pohon (*tree crops*) dapat berperan dalam

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

halaman 139

penyerapan efek gas rumah kaca seperti CO<sub>2</sub> dan mampu menghasilkan O<sub>2</sub> atau jasa lingkungan lainnya seperti konservasi *biodiversity* atau eko-wisata. Selain itu tanaman kelapa sawit juga menjadi sumber pangan dan gizi utama menu penduduk dalam negeri, sehingga kelangkaannya di pasar domestik berpengaruh sangat nyata dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan tanaman dan agribisnis kelapa sawit akan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat di atas apabila para pelaku agribisnis kelapa sawit, perbankan, lembaga penelitian dan pengembangan serta sarana dan prasarana ekonomi lainnya oleh berbagai instansi terkait memberikan dukungan dan peran aktifnya.

Perkebunan kelapa sawit juga berperan sangat penting dalam pembangunan daerah, dengan tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pedalaman. Kelapa sawit menjadi salah satu pilar penyangga kebangkitan kembali Indonesia. Fakta yang ada menunjukkan bahwa capaian keberhasilan itu bermula dari pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit melalui pola PIR sekitar 30 tahun yang lalu. Pengembangan pola PIR bukan satu hal yang kebetulan melainkan melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan konsepsi sampai dengan langkah implementasinya. Prosesnya memakan waktu cukup lama, penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan dalam setiap tahapannya.

Keberhasilan kegiatan pembangunan perkebunan dan implementasi kemitraan agribisnis kelapa sawit sangat bergantung pada kualitas peran serta pelaku mitra, baik perusahaan inti, petani, dan pemerintah. Meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin kesamaan peran antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani, dalam kenyataannya petani masih tertinggal dibandingkan perusahaan inti dalam berbagai aspek, termasuk aspek proses manajemen kemitraan dan manfaatnya. Petani belum mendapatkan kesempatan yang optimal dalam pelaksanaan peran, akses, kontrol serta manfaat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembangunan perkebunan yang belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan hubungan kemitraan.

Kesenjangan hubungan kemitraan di bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat ditengarai setidaknya dari dua aspek, *Pertama*, proses manajemen kemitraan mencakup indikator: perencanaan (perencanaan kemitraan dan kelengkapan perencanaan), pengorganisasian (bidang khusus dan kontrak kerjasama), pelaksanaan dan efektifitas kerjasama. *Kedua*, manfaat kemitraan dilihat dari indikator ekonomi (pendapatan, harga, produktivitas, dan resiko usaha), teknis (mutu dan penguasaan teknologi), dan sosial (keinginan kontinuitas kerjasama dan pelestarian lingkungan).

Dilihat dari dua aspek tersebut, ternyata kesenjangan hubungan kemitraan bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit masih terus terjadi, tidak terkecuali di Propinsi Jambi. Sehubungan dengan itu maka studi kebijakan kemitraan perkebunan kelapa sawit berorientasi kesejahteraan petani sangat perlu untuk dilakukan dan jika memungkinkan dapat dikaji lebih mendalam (kasus per kasus), dalam arti dilakukan penelitian-penelitian pendukung yang berorientasi mengkaji aspek-aspek mikro dari isu permasalahan yang berkenaan dengan hubungan kemitraan.

Dari uraian terdahulu maka permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kemitraan yang dilaksanakan

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi ? dan (2) Apakah kinerja kemitraan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kesepakatan, prosedur, serta sistem mekanisme kemitraan dan dapat meningkatkan pendapatan petani peserta ?

### METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jambi, yang dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jambi merupakan daerah keempat sentra kelapa sawit di Indonesia, setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau. Penelitian ini mengamati dan menganalisis implementasi kemitraan agribisnis kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Disain yang digunakan adalah disain kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif survei. Untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai, dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, studi lapangan, dan mengkolaborasi hasil-hasil penelitian terdahulu.

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan Gambaran umum tentang implementasi pola kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, dengan mengidentifikasi dan penelusuran terhadap bentuk pola kemitraan yang diterapkan oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian daripada itu dilanjutkan dengan menelusuri mekanisme dan kinerja pola kemitraan yang dilaksanakan. Setelah itu dilakukan analisis dengan cara membandingkan dengan standar normatif dan standar relatif.

Untuk selanjutnya metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan Gambaran umum tentang implementasi pola kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Untuk mengetahui implementasi pola kemitraan dapat dilihat dari awal pembentukan lahan perkebunan, konversi lahan, penetapan MOU, pembagian kebun plasma, cicilan kredit kebun plasma, kelembagaan, penetapan harga TBS dan produksi TBS. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, yang meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan juga mencakup verifikasi atas kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara : (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, (3) peninjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji karakteristik dan mekanisme pelaksanaan kemitraan yang dihubungkan dengan kinerja kemitraan berdasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

dalam perjanjian. Analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk uraian dan tabulasi sederhana.

Untuk menghitung tingkat pendapatan petani, yang merupakan tujuan ketiga dari penelitian ini, pada pola kemitraan yang berbeda di perusahaan perkebunan kelapa sawit Provinsi Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi**

Pola kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Suatu strategi bisnis kemitraan keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Mekanisme kerjasama antara perusahaan inti dan petani plasma dalam kemitraan baik PIR Trans maupun KKPA meliputi kegiatan penyediaan sarana produksi, pembinaan, panen, sortasi, penetapan harga TBS, sistem pembayaran, dan pengolahan TBS.

#### **1. Penyediaan Sarana Produksi**

Sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan di antaranya adalah bibit, pupuk, lahan, perbaikan jalan dan jembatan desa, bantuan jonder, traktor, dan pembangunan kantor KUD. Perusahaan inti berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan segala kebutuhan petani dalam produksi usahatani kelapa sawit. Perusahaan berkerjasama dengan Bank dan pemerintah yang turut serta dalam pelaksanaan program KKPA dan PIR Trans. Pembayaran sarana produksi dilakukan secara kredit oleh petani plasma kepada inti.

#### **2. Pembinaan**

Perusahaan inti memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada petani plasma. Pembinaan yang dilakukan terbagi kepada dua sistem yaitu pembinaan rutin oleh tim dari perusahaan inti dan penyuluh pertanian. Pembinaan rutin dilakukan 6 bulan sekali untuk tiap satuan pemukiman dengan sistem pembinaan secara langsung dan diadakan bila diperlukan, dilakukan oleh mandor yang mengawasi setiap satu pemukiman. Jika petani memiliki keluhan atau ingin menanyakan mengenai proses usahatani kelapa sawit maka mereka dapat langsung bertanya kepada mandor yang bertugas di wilayah mereka. Mandor juga bertugas menyampaikan informasi yang diterima dari perusahaan misalnya mengenai sistem panen, harga TBS, dan informasi lainnya.

#### **3. Sistem Panen**

Panen kelapa sawit dilakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan. Pelaksanaan panen dilakukan selama satu hingga dua hari terdiri dari kegiatan pemotongan buah dari pohon, pengumpulan buah di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), penimbangan buah dan pengangkutan buah sampai pabrik inti. Semakin cepat buah sampai di pabrik dan diolah maka mutu CPO yang dihasilkan pun akan lebih baik. Pengiriman TBS biasanya didampingi oleh perwakilan anggota KUD yang dapat mengawasi proses sortasi.

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

#### **4. Sistem Sortasi**

Sistem sortasi yang dilakukan perusahaan yaitu sistem bongkar total, buah yang ada di dalam truk angkutan dibongkar semua dan dipilih buah yang sesuai dengan kriteria panen menurut SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.627 Tahun 1998. Penetapan denda untuk buah yang disortasi terdiri dari denda buah mentah, tandan terlalu matang, tangkai panjang dan denda kotoran.

#### **5. Sistem Penetapan Harga**

Penetapan harga TBS dibuat sesuai dengan ketentuan di dalam SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.627 Tahun 1998. Harga TBS ditentukan oleh tim yang terdiri dari dinas perkebunan, wakil perusahaan inti, dan wakil petani plasma. Penetapan harga dilakukan dan diumumkan setiap dua minggu sekali.

#### **6. Sistem Pembayaran TBS**

Pembayaran TBS dilakukan selama satu bulan sekali. Pembayaran dilakukan secara kolektif melalui KUD, kemudian pengurus KUD akan membagikan kepada anggotanya sesuai dengan hasil panennya. Bukti pembayaran TBS akan diberikan perusahaan kepada pengurus KUD.

### **Hubungan Kinerja dan Implementasi Kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi**

Evaluasi kemitraan dapat dilakukan dengan melihat penilaian pihak yang terlibat dalam kemitraan, seperti penilaian dari perusahaan inti terhadap kemitraan dan penilaian dari petani plasma. Perusahaan inti merasa cukup puas dengan kinerja petani plasma dalam kemitraan selama ini. Pihak inti sudah merasa cukup dipercaya dan diterima oleh petani plasma. Tanggapan inti terhadap kinerja petani plasma dalam kemitraan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak inti yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan antara PT Agrowiyana dan PT. Kirana Sekernan dengan petani plasma. Menurut hasil wawancara kegiatan yang dimulai dari tahap proyek hingga saat ini telah menunjukkan dampak positif bagi masyarakat sekitar terutama bagi petani plasma. Peningkatan pendapatan petani peserta karena adanya jaminan pemasaran hasil TBS kelapa sawit. Meningkatnya pendapatan petani plasma pada akhirnya akan menstimulir perkembangan ekonomi lokal, sehingga terbuka kesempatan berusaha masyarakat setempat dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, yang berarti pula akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Kesepakatan yang terjalin bersama KUD atau petani peserta dalam hal jaminan penerimaan hasil TBS petani, akan memberikan kepastian perolehan bahan baku TBS berkualitas baik secara berkelanjutan, bagi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, sedangkan beberapa kendala yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak inti diantaranya adalah:

- 1) Saat konversi kebun, ketika kelapa sawit mulai berproduksi dimana pengelolaan kebun diserahkan sepenuhnya kepada petani peserta sedangkan perusahaan mitra hanya sebagai sumber bimbingan teknis. Perilaku petani plasma menjadi terfokus pada usaha untuk mengejar pendapatan maksimal jangka pendek dan kurang peduli terhadap risiko jangka panjang, seperti penurunan produktivitas lahan.
- 2) Pelaksanaan perawatan dan panen belum memenuhi standar yang ditetapkan

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

atau diharapkan. Sehingga mutu TBS yang diserahkan plasma kepada inti tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

- 3) Kemampuan SDM pengurus KUD atau kelompok tani dan permodalan KUD yang sangat terbatas.
- 4) Pelaksanaan pemanenan telah dilakukan oleh tenaga upahan. Terlibatnya peran para tengkulak TBS kelapa sawit, yang dimungkinkan terjadi karena para tengkulak mempunyai kemampuan untuk membeli TBS petani peserta secara tunai, disamping para petani itu sendiri yang sudah terjebak dengan hutang kepada para tengkulak sehingga terpaksa menjual TBS nya kepada tengkulak tersebut. Banyak lahan petani peserta tidak dilakukan perawatan secara optimal, baik karena pemiliknya tidak berada dilokasi plasma ataupun kurang kepedulian dari petani peserta terhadap kebun kelapa sawitnya. Kondisi pertumbuhan tanaman yang tidak baik dan ditambah tingkat perawatan yang rendah menyebabkan produksi TBS, baik secara kualitas maupun kuantitas rendah. Adanya peran tengkulak TBS kelapa sawit yang embeli TBS petani peserta membawa permasalahan tersendiri bagi perusahaan mitra. Adanya indikasi penukaran TBS atau pencampuran terhadap TBS petani peserta yang dibelinya, yang pada dasarnya jenis dan kualitas TBS yang dihasilkan jauh lebih baik dengan TBS lain dari luar petani plasma. Sementara TBS petani peserta dibawa dan dijual dengan cara-cara sedemikian rupa ke pabrik lain dengan harga yang lebih tinggi.
- 5) Penggunaan tenaga upahan untuk pemanenan kebun petani peserta, sering menimbulkan benturan antara petani peserta dan PT Agrowiyana. Karena besar kecil pendapatan tenaga upahan tersebut tergantung banyak sedikitnya (*tonnase*) TBS yang dipanennya, sehingga cenderung untuk memanen TBS yang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

Atribut yang memberikan kepuasan kepada petani plasma atas kinerja kemitraan diantaranya adalah harga sarana produksi yang ditetapkan oleh inti, harga beli TBS, ketepatan waktu pembayaran TBS oleh inti, peranan inti dalam membantu pengembalian kredit petani plasma, tanggapan inti dalam memberi layanan cicilan/kredit, disiplin inti dalam mentaati perjanjian, dan sikap inti terhadap kesejahteraan petani plasma.

Evaluasi terhadap tanggapan petani plasma terhadap kinerja kemitraan adalah :

- 1) Kerusakan jalan dan jembatan membuat pengangkutan TBS dari petani plasma ke pabrik menjadi terhambat. Selain itu petani mengeluarkan biaya diluar usahatani untuk melakukan perbaikan terhadap jalan. Pihak inti telah berperan dalam memberikan bantuan alat-alat berat untuk perbaikan jalan dan pengangkutan TBS seperti jonder dan traktor. Biaya perbaikan dibebankan kepada petani dalam bentuk hutang dan dapat dilunasi dengan cara dicicil.
- 2) Sistem sortasi yang ditetapkan oleh inti menjadi masalah bagi petani plasma. Petani plasma sering merasa tidak puas dengan sortasi yang dilakukan inti, karena banyak buah yang dikembalikan sehingga pendapatan petani menjadi berkurang. Antrian buah di pabrik juga menjadi masalah bagi petani plasma, proses pengangkutan menjadi terhambat.
- 3) Ketidakcocokan dengan mandor yang bertugas di wilayah tersebut. Komunikasi yang dibangun oleh mandor kepada petani plasma sering

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

halaman 144

menimbulkan konflik sehingga banyak dari petani plasma yang menginginkan mandor di wilayah tersebut diganti.

Kemitraan yang dibangun antara petani plasma dan inti dibentuk berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama. Peraturan kerjasama tersebut terdiri dari hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini belum terealisasi sebagaimana mestinya yang tertulis dalam perjanjian. Adapun kewajiban petani yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengusahaan kebun sesuai bimbingan dari perusahaan inti, namun kesalahan panen masih terjadi yaitu buah yang dipanen masih tergolong mentah.
- 2) Membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut diberikan kredit lunak jangka panjang oleh bank pemerintah.
- 3) Melunasi kreditnya sudah dilaksanakan sesuai perjanjian, sebagian besar petani yang bermitra telah lunas membayar kredit.
- 4) Menyerahkan atau menjual hasil kebun plasma (TBS) kepada perusahaan inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama kedua belah pihak. Walaupun masih ada beberapa petani yang menjual kepada pihak lain seperti tengkulak. Adanya peran tengkulak TBS kelapa sawit yang membeli TBS petani peserta membawa permasalahan tersendiri bagi perusahaan mitra. Adanya indikasi penukaran TBS dan/atau pencampuran terhadap TBS petani peserta yang dibelinya, yang pada dasarnya jenis dan kualitas TBS plasma jauh lebih baik dengan TBS lain dari luar petani plasma. Kejadian ini menyebabkan pelaksanaan kewajiban petani menjadi kurang sesuai dengan perjanjian.

Hal yang menjadi hak petani plasma sebagai peserta kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah :

- 1) Memperoleh bimbingan teknis dan non teknis dari pihak perusahaan mitra yakni PT Agrowiyana dan PT. Kirana Sekernan dibantu oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, hal tersebut dirasa tidak sesuai, pembinaan masih jarang dilakukan. Pembinaan formal hanya dilakukan enam bulan sekali.
- 2) Selain itu petani plasma berhak memperoleh jaminan penjualan hasil/produksi TBS kelapa sawit kepada perusahaan inti, sejauh kualitas TBS yang diserahkan sesuai dengan kriteria atau standar TBS yang telah ditetapkan oleh pabrik.

Adapun kewajiban perusahaan inti sebagai mitra usaha perkebunan kelapa sawit adalah :

- 1) Melaksanakan pembangunan kebun petani peserta sesuai dengan petunjuk standar teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Perusahaan selalu mengusahakan agar kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kemitraan dilakukan berdasarkan petunjuk dan telah disetujui oleh Dinas Perkebunan.
- 2) Mengikutsertakan petani peserta secara aktif dalam proses pembangunan kebun. Petani membantu perusahaan sebagai tenaga kerja pada saat pembangunan kebun dan perusahaan memberikan bimbingan teknis kepada petani dengan tujuan petani mampu menjadi petani mandiri setelah masa

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

konversi, maka kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan petani dalam pembangunan kebun sudah sesuai.

- 3) Memberikan pembinaan secara teknis dan manajemen kepada petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pembangunan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman.
- 4) Membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun, dimana pembelian dan pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan pihak yang bermitra, dan dinilai sudah sesuai dengan perjanjian.
- 5) Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan menjamin pengembalian kredit petani peserta, petani plasma telah melunasi kredit kemitraannya kepada bank melalui perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
- 6) Melaksanakan penyuluhan kepada para pekebun yang menjadi mitra usaha.

Disamping itu perusahaan mitra berhak untuk menjadi penampung sepenuhnya hasil TBS petani peserta sesuai standar/kriteria yang ditetapkan. Keseluruhan dari hak dan kewajiban baik petani plasma maupun ini sudah terlaksana dan sebagian besar dinilai sudah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tabel 1. Hubungan Implementasi dan Kinerja Kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Trans dan KKPA

| Variabel  | Pola Kemitraan |              |
|---|----------------|--------------|
|   | PIR Trans      | KKPA         |
| <b>I. Implementasi</b>  |                |              |
| 1) Konversi kebun plasma  | 50             | 50           |
| 2) Penetapan MOU  | 20             | 20           |
| 3) Pembagian kebun plasma   | 50             | 50           |
| 4) Cicilan/kredit kebun plasma  | 50             | 50           |
| 5) Kelembagaan  | 10             | 20           |
| 6) Penetapan harga TBS  | 30             | 30           |
| 7) Produksi   | 10             | 10           |
| 8) Sistem pembayaran  | 20             | 20           |
| <b>Jumlah Nilai Maksimum Aspek Implementasi Kemitraan</b>                 | <b>240</b>     | <b>240</b>   |
| <b>II. Kinerja Kemitraan</b>  |                |              |
| Proses manajemen kemitraan: 1) Perencanaan                                | 150            | 150          |
| 2) Pengorganisasian   | 130            | 130          |
| 3) Pelaksanaan  | 150            | 150          |
| Manfaat: 1) Teknis  | 30             | 30           |
| 2) Ekonomi  | 210            | 230          |
| 3) Sosial   | 150            | 140          |
| <b>Jumlah Nilai Maksimum Aspek Proses Manajemen dan Manfaat Kemitraan</b> | <b>820</b>     | <b>830</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>1.060</b>   | <b>1.070</b> |

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

## Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pada Pola Kemitraan PIR Trans dan KKPA

Pendapatan petani kelapa sawit merupakan penerimaan yang diperoleh petani plasma berupa hasil penjualan produksi TBS ke pabrik kelapa sawit yang akan dijadikan sebagai minyak sawit mentah (CPO) dan juga inti sawit. Salah satu faktor yang paling menentukan pendapatan petani kelapa sawit adalah faktor produksi TBS. Semakin tinggi produksi TBS yang dihasilkan semakin tinggi juga penerimaan yang akan diperoleh petani.

Penerimaan petani didapat dari hasil kali antara jumlah produksi dengan harga yang diterima petani. Semakin besar penerimaan petani semakin besar juga pendapatan yang diperoleh petani. Faktor produksi dan harga, biaya juga merupakan salah satu penentu pendapatan yang akan diperoleh petani. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan petani maka akan semakin berkurang pendapatan yang diperoleh petani sawit. Adapun biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan petani atau yang harus dibayar petani kepada KUD yang telah menjalin kerjasama antara pihak petani, pihak KUD dan Perusahaan Perkebunan.

Pola PIR Trans dan KKPA memiliki rincian biaya yang berbeda. Pada pola PIR Trans biaya yang wajib dibayarkan kepada KUD adalah biaya angkutan TBS, biaya simpanan wajib, biaya keamanan dan jasa KUD. Pihak KUD pola PIR Trans tidak menyediakan sarana obat-obatan atau pupuk, sehingga biaya pemeliharaan dan pemupukan tidak dimasukkan. Sedangkan pada pola KKPA biaya yang wajib dibayarkan pada KUD yaitu biaya keamanan, biaya perawatan jalan, dan biaya pupuk. Pihak KUD pola KKPA menyediakan sarana pupuk, sehingga biaya pemupukan dimasukkan, sedangkan biaya obat-obatan tidak dimasukkan karena pihak KUD tidak menyediakan sarana tersebut.

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan yang diterima petani dengan total biaya yang dikeluarkan petani. Dalam penelitian ini, pendapatan petani yang dimaksud adalah pendapatan kotor yang diterima petani plasma dalam periode Januari -Desember Tahun 2010, melalui penerimaan yang diterima petani dari usahatani kelapa sawit dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan petani. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya produksi petani yang wajib dibayarkan melalui KUD yang bekerja sama dengan petani dan juga perusahaan inti.

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara petani pola PIR Trans dan petani pola KKPA digunakan analisis Uji Beda Dua Rata-rata. Untuk menganalisis perbedaan tersebut digunakan alat bantu analisis SPSS 16.0 dengan uji *independent sample t-test*. Hasil pengujian menggunakan SPSS 16.0 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara nominal rata-rata pendapatan petani pola PIR Trans lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan petani pola KKPA. Untuk melihat signifikan atau tidaknya perbedaan rata-rata pendapatan petani pola PIR Trans dan pendapatan rata-rata petani pola KKPA secara statistik dapat dilihat pada hasil analisis pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk pengujian dua arah nilai signifikansi *Sig.(2-tailed)* untuk perbedaan rata-rata pendapatan antara petani pola PIR Trans dan KKPA adalah 0,012. Untuk pengujian hipotesis satu arah maka nilai signifikansi yang digunakan adalah setengah dari nilai *Sig (2-tailed)* yaitu  $0,06 > \alpha$ . 0,05 dan untuk pengujian menggunakan nilai  $t_{hitung} = 2,747$  dengan

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

tingkat kepercayaan 95% dan df 20,409 diperoleh  $t_{Tabel} = 2,086$  maka dapat dilihat  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{Tabel}$  yaitu  $2,747 > 2,086$ . Dari kedua pengujian hipotesis tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani pola PIR Trans dengan petani pola KKPA.

Tabel 2. Deskriptif Statistik Pendapatan Petani Pola PIR Trans dan Petani Pola KKPA

|            | Petani    | N  | Mean        | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|------------|-----------|----|-------------|----------------|-----------------|
| Pendapatan | PIR Trans | 18 | 30517774.22 | 10043327.17    | 2.3672          |
|            | KKPA      | 27 | 23700360.44 | 3874537.491    | 7.4565          |

Tabel 3. Hasil Uji *Independent Sampel t-test* antara Rata-rata Pendapatan Petani Pola PIR Trans dan KKPA

|            | t-test for Equality of Means |        |                 |
|------------|------------------------------|--------|-----------------|
|            | t                            | df     | Sig. (2-tailed) |
| Pendapatan | 2.747                        | 20.409 | 0.012           |

Perbedaan pendapatan yang diterima petani pola PIR Trans dengan petani pola KKPA disebabkan karena adanya perbedaan rata-rata produksi, dimana rata-rata produksi petani pola PIR Trans lebih besar dibandingkan dengan rata-rata produksi pola KKPA. Perbedaan produksi ini disebabkan adanya perbedaan penerapan antar pola pada saat pemeliharaan hingga panen. Dalam hal ini kemitraan yang dijalin petani PIR Trans dengan pihak perusahaan perkebunan lebih menguntungkan petani dalam hal produksi.

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pola PIR Trans dan KKPA

| Variabel        | PIR Trans | KKPA      | Perbedaan |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Penerimaan (Rp) | 5.529.893 | 5.392.992 | 136.901   |
| Biaya (Rp)      | 443.597   | 414.280   | 29.317    |
| Pendapatan (Rp) | 5.086.296 | 4.978.712 | 107.584   |

Secara nominal rata-rata pendapatan petani pola PIR Trans lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan petani pola KKPA, namun pada dasarnya hampir sama karena perbedaannya hanya kecil (2,14%).

### KESIMPULAN

1. Kinerja kemitraan yang diimplementasikan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi pada dasarnya telah berhasil menciptakan petani mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi petani plasma, namun belum berjalan sesuai dengan proses manajemen kemitraan dan tahapan kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlaku. Hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani sebagai plasma sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit penyimpangan yang dilakukan petani dan perusahaan, namun dalam hal ini, tidak telalu berpengaruh pada kinerja pola kemitraan itu sendiri.

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

2. Kinerja kemitraan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah berjalan dengan baik tersebut belum memberikan pengaruh kepada peningkatan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh petani peserta karena hanya pada peningkatan pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit. Secara nominal rata-rata pendapatan petani pola PIR Trans lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan petani pola KKPA, namun pada dasarnya hampir sama karena perbedaannya hanya kecil (2,14%). Artinya, dengan nilai kemitraan yang relatif sama juga (71%) dapat meningkatkan pendapatan petani tidak terlalu berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mangga Barani, 2007. *Pembangunan Perkebunan Masa Depan*. Orasi Ilmiah yang disampaikan pada Rapat Senat Luar Biasa dalam rangka Dies Natalis VII dan Wisuda Sarjana Universitas Islam Makassar.
- Burn, A.A., 1962. *Partnership, Encyclopedia of Social Sciences*. MCMLXII. E.R.A A.Sclingmen and A. Jhonston (eds.), New York, The Macmillan.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2008. *Statistik Perkebunan Provinsi Jambi*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, 2007. *Statistik Perkebunan Indonesia, Kelapa Sawit*. Jakarta.
- <http://ditjenbun.deptan.go.id>. *Sekilas Perkelapasawitan Indonesia*. Written by Administrator Wednesday, 16 July 2008. Download : Rabu, 17 Maret 2010.
- Iyung Pahan, 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit – Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.
- Mariotti, John L., 1996. *The Power of Partnerships*. Blackwell Publisher, Massachussets, USA.
- Mahsun, M., 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE, Yogyakarta.
- McEachern, 1988. *Economics: A Contemporary Introduction*. Cincinnati, Ohio, South Western Publishing, Co.
- Memed Gunawan, 2003. *Agribisnis sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Nasional Sekarang dan Mendatang*. Materi Kuliah Perdana Program Magister Agribisnis Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Miller, D.C., 1983. *Handbook of research Design and Social Measurement*. Longman, New York & London.
- Mohammad Jafar Hafsah. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad Firdaus. 2008. *Manajemen Agribisnis*. PT. Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang *Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang *Kemitraan*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 1997.
- Rante Tondok, A., 1997. *Peranan Perkebunan Besar Sebagai Mitra Perkebunan Rakyat*. Majalah media Perkebunan, Nomor 15 April 1997.

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

- Saptawan, A., 2000. *Model Pembangunan Lembaga Petugas Lapangan Pembangunan yang Efektif dalam Rangka Pembangunan Pedesaan*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Schonberger J., Edward M. Knod, Jr. 1991. *Operations Management; Improving Customer Service*. 4<sup>th</sup> ed. Richard D. Irwin Inc., Boston, USA.
- Sukanto. 2008. *58 Kiat Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya, Depok.
- Sunarko. 2007. *Petunjuk Praktis Budidaya & Pengolahan Kelapa Sawit*. AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Sunarko. 2009. *Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. Penerbit PT. AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Suryana, 2008. *Statistika Terapan : Teori dan Aplikasi Statistik*. Mengukur Distribusi Pendapatan. <http://statistikaterapan.wordpress.com>. 10 September 2008.
- Syafri Mangkuprawira, 2007. *Kinerja: Apa Itu?* <http://ronawajah.wordpress.com/2007>.
- Ta'dung, M., 1997. *Mengembangkan dan Memantapkan Kemitraan Agribisnis Subsektor Perkebunan*. Majalah Perkebunan, Nomor 17, Agustus 1997.
- Tambunan, T. T.H. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jl. Rancamaya Km 1 No. 47 Bojongkerta, Ciawi – Bogor.
- Undang Fadjar. 2006. *Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 1, Juli 2006: 46 - 60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang *Perkebunan*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004.
- Wayan, R. Susila. 2009. *Peluang Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia: Perspektif Jangka Panjang 2025*, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Bogor, Indonesia.
- Wirawan, S. 2003. *Konsep Kemitraan*. Disajikan pada Pertemuan Pemantapan Jejaring Kemitraan dalam Menunjang Intensifikasi PPM – PL Tahun 2003. Cibogo – Jawa Barat, 29 Oktober s.d. 1 November 2003.
- Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Diterbitkan oleh Fascho Publishing, Jl. Ketumbar NO. 2A Gresik, 61118.